



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JOMBANG

RENCANA KERJA TAHUN 2024

JL. URIP SUMOHARJO NO.47 JOMBANG

TELP. (0321) 863448

Email : kesbangpol@jombangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Sebagai suatu instrument kebijakan daerah, Rencana Kerja memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang, karena selain dapat memberikan arah dalam pelaksanaan kerja, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja itu sendiri. Selain itu Rencana Kerja adalah sebagai acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang maupun mendatang.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dapat terealisasi yang didukung dengan pendanaan yang proporsional guna melaksanakan urusan pemerintahan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Jombang, 11 Juli 2023

KEPALA BAKESBANGPOL



Drs. ANWAR, M.KP

Pembina Utama Muda

NIP. 197104181992011004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan	
Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	
Daerah.....	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	47
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	50
3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	75
4.1 Rencana Kerja Dan Kerangka Pendanaan.....	75
BAB V PENUTUP	82
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	82
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	82
5.3 Rencan Tindak Lanjut.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang	24
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2022	36
Tabel 2.4	Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Jombang	48
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang	65
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang	77

PENDAHULUAN**Bab
1****1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan. Renja OPD merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja OPD juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu dan berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

- 1) Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RPJMD;
- 2) Rumusan program kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan ataupun pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- 3) Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- 4) Rumusan program kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan atau pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- 5) Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RPJMD, RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Menteri Dalam negeri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang;
17. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya serta sebagai dasar untuk mempermudah upaya pembinaan dan pemberdayaan, sehingga sasaran dan target capaian yang dilaksanakan di dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2024;
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024;
3. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah untuk :

1. Memberikan pedoman Sistematisa penyusunan Renja OPD Tahun 2024;
2. Memberikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja pada masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematisa dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematisa Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU****Bab
2****2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA PD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jombang. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 6 (enam) program dan 12 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Jombang sebesar Rp. 73,867,200,144,00.

terdiri dari :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah;
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- 1.5. Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah;
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 5.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dari 1 kegiatan sebagai berikut:
 - 6.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase rata-rata capaian kinerja aparatur	200	100	100	100	100%	100	60,4	60%
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan	200	100	100	100	100%	100	75	75%
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	36	9	27	27	100%	3	2	67%
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	27	27	12	12	100%	5	2	40%
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	186	86	100	100	100%	100	100	100%
		Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	200	100	100	100	100%	100	52.91	#VALUE!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Bakesbangpol yang difasilitasi	102	14	20	20	100%	20	20	100%
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	0	0	0	0	0%	14	3	21%
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	18	17	1	1	100%	1	1	100%
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun	17	4	4	4	100%	17	5	29%
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200	100	100	100	100%	100	50	50%
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23	0	23	23	100%	1	1	100%
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	0	100	100	100%	3	3	100%
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang terfasilitasi	9	6	2	2	100%	2	2	100%
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	10	6	2	2	100%	3	3	100%
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor	45	29	16	16	100%	2	2	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	3764	1887	1877	0	0%	4	1	25%
		Jumlah Pemenuhan Barang Penggandaan	33519	100	33419	0	0%	100	83,33	83%
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan bahan bacaan	5	3	1	1	100%	12	10	83%
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	182	89	93	93	100%	100	50	50%
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	200	100	100	100	100%	12	3	25%
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	4	0	4	4	100%	100	60,03	60%
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24	12	12	12	100%	12	5	42%
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	200	100	100	100	100%	1	1	100%
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional a	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	18	3	15	15	100%	74	9	12%
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	27	12	15	15	100%	12	6	50%
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	50	25	25	25	100%	25	14	56%
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang ditetapkan	200	100	100	100	100%	100	100	100%
		Prosentase peningkatan pemahaman peserta di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	03:04	1	02:04		0%	03:04	0	0%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diusulkan	200	100	100	100	100%	100	100	100%
		Prosentase pemahaman peserta bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	144	69	75	0	0%	80	82	103%
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembau	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang tersusun	10	5	5	5	100%	3	1	33%
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pemb	Jumlah rumusan kebijakan teknis di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang tersusun	6	3	3	3	100%	3	2	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan dilaksanakan	6	3	3	3	100%	1150	300	26%
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah kegiatan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang dikordinasikan	24	12	12	12	100%	235	50	21%
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Ka	Jumlah laporan monev bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang tersusun	24	12	12	12	100%	12	3	25%
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE	Prosentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	200	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik	Prosentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	20	10	10		0%	10	0	0%
		Prosentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan	200	100	100	0	0%	100	100	100%
		Prosentase pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	76	76	0	0	0%	80	80	100%
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik tersusun	32	16	16	16	100%	3	3	100%
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik tersusun	32	16	16	16	100%	5	4	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fas	Jumlah kebijakan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, serta situasi politik di Daerah dilaksanakan	32	16	16	16	100%	950	400	42%
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fa	Jumlah kegiatan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan umum /pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik yang dikoordinasikan	32	16	16	16	100%	150	50	33%
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, P	Jumlah laporan movev bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	32	16	16	16	100%	4	1	25%
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase rumusan kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat yang ditetapkan	200	100	100	100	100%	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Prosentase peningkatan pemahaman peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	21	11	10		0%	10	0	0%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Prosentase rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	100	100	100	100	100%	100	100	100%
		Prosentase pemahaman peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	76	76	0	0	0%	80	80	100%
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang tersusun	32	16	16	16	100%	4	1	25%
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Me	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang tersusun	32	16	16	16	100%	3	1	33%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah kebijakan bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang dilaksanakan	32	16	16	16	100%	508	200	39%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Diband Pendaftar Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evalua	Jumlah laporan movev bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	32	16	16	16	100%	4	1	25%
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	200	100	100	100	100%	100	100	100%
		Prosentase peningkatan pemahaman peserta Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	03:04	1	02:04		0%	03:04	0	0%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang diusulkan	200	100	100	100	100%	100	100	100%
		Prosentase pemahaman peserta Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	143	68	75	75	100%	100	80	80%
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Peny	Jumlah Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	10	5	5	5	100%	3	2	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tersusun								
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Penc	Jumlah Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah tersusun	3	3	3	3	100%	3	2	67%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalag	Jumlah Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	6	3	3	3	100%	1150	300	26%
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalag	Jumlah Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di	24	12	12	12	100%	270	50	19%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		daerah yang dikoordinasikan								
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasil	Jumlah Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	24	12	12	12	100%	12	3	25%
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Prosentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	200	100	100	100	100%	100	100	100%
		Prosentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	21	11	10		0%	10	0	0%
		Jumlah potensi konflik yang	48	22	26	26	100%	24	5	21%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tertangani								
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik So	Prosentase rumusan kebijakan bidang Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang diusulkan	200	100	100	100	100%	100	100	100%
		Prosentase pemahaman peserta dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80	10	70	70	100%	75	80	107%
		Jumlah potensi konflik yang terdeteksi	98	48	50	0	0%	50	25	50%
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Te	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen di daerah yang tersusun	10	5	5	5	100%	4	4	100%
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Ora	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen di daerah yang tersusun	5	5	5	5	100%	4	4	100%
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenag	Jumlah laporan khusus bidang kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	216	0	216	216	100%	1708	625	37%
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tena	Jumlah kegiatan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen di daerah yang dikoordinasikan	12	12	12	12	100%	572	300	52%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%) (2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pema	Jumlah laporan monev bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penarangan konflik di daerah	12	12	12	12	100%	12	3	25%
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor forpimda yang dilaksanakan	12	12	12	12	100%	12	3	25%

Dari tabel di atas dapat disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja pada program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang tahun 2023 sebagai berikut :

Salah satu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja Meningkatnya kewaspadaan terhadap konflik sosial adalah adanya kerjasama yang baik antar instansi baik vertikal maupun daerah serta tingginya peran serta masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban baik secara swadaya maupun melalui forum-forum yang dibentuk pemerintah yang difasilitasi maupun dikoordinir oleh Bakesbangpol Kabupaten Jombang. Perlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, generasi muda dalam kegiatan-kegiatan tersebut sampai saat ini sangat efektif mewujudkan capaian kinerja dalam Meningkatnya kewaspadaan terhadap konflik sosial.

Adapun program Kegiatan penunjang tingkat keberhasilan dalam Peningkatan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Dini, Politik, Sosial, Kemasyarakatan dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi diantaranya :

a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan penyuluhan terbagi dari tematik dalam penggalangan peningkatan kewaspadaan dini dengan sasaran peserta dari anggota FKDM (Forum Kerukunan Umat Beragama) kecamatan dan desa di Kabupaten Jombang.

Kegiatan Penanganan Konflik dalam tehnik pencegahan dan penanganan kejahatan dengan adanya Rapat koordinasi Bakesbangpol, OPD terkait, Instansi vertikal yang diadakan tiap bulannya terkait segala kegiatan yang bisa menjadi potensi kerawanan di Masyarakat, Memantau dan melaporkan Kepada Bupati hal-hal yang bisa menjadi potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan memperluas jaringan informasi sampai ranah Desa pada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat, dengan harapan masyarakat memiliki kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya

ancaman keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

- Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini dalam Penanganan Gangguan Keamanan Di Daerah dengan kegiatan Rakor Tim Kewaspadaan Dini dalam Negeri Tingkat Kabupaten yang anggotanya terdiri dari OPD terkait, Instansi Vertikal yang dilaksanakan tiap bulan dan dengan terbentuknya tim tersebut diharapkan kemungkinan munculnya AGHT di Kabupaten Jombang dengan terdeteksi dengan mudah dan cepat sehingga kondusifitas daerah tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan penyuluhan bertema dengan peningkatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan sasaran organisasi masyarakat di kabupaten jombang, serta meningkatkan kebijakan tentang PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) dan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) serta fasilitasi kegiatan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan).
- c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya
Kegiatan penyuluhan bertema dengan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah Kabupaten Jombang dengan peserta dari instansi Pemerintah dan juga Organisasi Masyarakat serta fasilitasi kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).
- d. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Kegiatan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan mengenai peraturan dalam pelaksanaan pencairan dana Hibah Partai Politik di Daerah, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi bantuan Partai Politik.
- e. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan mengenai peraturan dalam pelaksanaan pencairan dana Hibah Organisasi Masyarakat di Daerah, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi

bantuan Organisasi Masyarakat. Pengembangan aplikasi untuk update data struktur Organisasi Ormas.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai telah dilaksanakan suatu program/kegiatan capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan pemanfaatan data kinerja

Pelaksanaan Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Jombang, apabila dibandingkan dengan target kinerjanya semuanya hasilnya dikatakan baik.

Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Program /kegiatan dan sub kegiatan	SPM	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Ket
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
Prosentase rumusan kebijakan bidang penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang ditetapkan			n/a	n/a	100%	100	100	
Prosentase peningkatan pemahaman peserta di bidang penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			n/a	n/a	0.98%	03:04	n/a	
Prosentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diusulkan			n/a	n/a	100%	100	100	
Prosentase pemahaman peserta bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			n/a	n/a	68.88%	80	n/a	
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang tersusun			n/a	n/a	5 dok	5	3	
Rumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang tersusun			n/a	n/a	3 dok	3		
Jumlah kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan dilaksanakan			n/a	n/a	3 kebijakan	3		
Jumlah kegiatan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan yang dikordinasikan			n/a	n/a	12 keg	12	440	

Indikator Program /kegiatan dan sub kegiatan	SPM	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Ket
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
Jumlah laporan monev bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan			n/a	n/a	12 laporan	12	4	
Prosentase rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan			n/a	n/a	100%	100	100	
Prosentase peningkatan pemahaman peserta Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya			n/a	n/a	1.6%	10		
Prosentase rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang diusulkan			n/a	n/a	100%	100		
Prosentase pemahaman peserta Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya			n/a	n/a	68.14%	80	100	
Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			n/a	n/a	5 dok	5	2	
Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			n/a	n/a	3 dok	3		
Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			n/a	n/a	3 kebijakan	3		

Indikator Program /kegiatan dan sub kegiatan	SPM	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Ket
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			n/a	n/a	12 keg	12	415	
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			n/a	n/a	12 laporan	12	4	
Prosentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan			n/a	n/a	100%	100	100	
Prosentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			n/a	n/a	10.10 %	10		
Prosentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan			n/a	n/a	100%	100	100	
Prosentase pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			n/a	n/a	76.34%	80		
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			n/a	n/a	16 dok	16	3	

Indikator Program /kegiatan dan sub kegiatan	SPM	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Ket
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			n/a	n/a	16 dok	16		
Jumlah kebijakan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan			n/a	n/a	16 dok	16		
Jumlah kegiatan bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dikoordinasikan			n/a	n/a	16 dok	100	440	
Jumlah laporan money bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			n/a	n/a	16 dok	16	4	
Prosentase rumusan kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan			n/a	n/a	100%	100	100	
Prosentase peningkatan pemahaman peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			n/a	n/a	10.65 %	10		
Prosentase rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan			n/a	n/a	100%	100	100	

Indikator Program /kegiatan dan sub kegiatan	SPM	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Ket
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
Prosentase pemahaman peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			n/a	n/a	76.34 %	80		
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang tersusun			n/a	n/a	16 dok	16	4	
Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang tersusun			n/a	n/a	16 dok	16		
Jumlah kebijakan bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang dilaksanakan			n/a	n/a	16 dok	16	350	
Jumlah laporan money bidang pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah			n/a	n/a	16 dok	16	4	
Prosentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan			n/a	n/a	100%	100	100	
Prosentase peningkatan pemahaman peserta Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			n/a	n/a	10.65%	10		
Jumlah potensi konflik yang tertangani			n/a	n/a	22 kasus	24		
Prosentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Diusulkan			n/a	n/a	100%	100	100	
Prosentase pemahaman peserta dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			n/a	n/a	68.00 %	75		
Jumlah potensi konflik yang terdeteksi			n/a	n/a	47 kasus	50		

Indikator Program /kegiatan dan sub kegiatan	SPM	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Ket
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang tersusun			n/a	n/a	5 dok	5	2	
Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang tersusun			n/a	n/a	5 dok	5		
Jumlah kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang dilaksanakan			n/a	n/a	322 kasus	216	1408	
Jumlah kegiatan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang dikoordinasikan			n/a	n/a	12 keg	12		
Jumlah laporan money bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah			n/a	n/a	12 laporan	12	216	
Jumlah rakor forpimda yang dilaksanakan			n/a	n/a	12 rakor	12	12	
Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur			n/a	n/a	100 %	100	100	

Indikator Program /kegiatan dan sub kegiatan	SPM	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		Ket
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan			n/a	n/a	100 %	100	100	
Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun			n/a	n/a	9 dok	9	3	
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun			n/a	n/a	27 dok	27	12	
Prosentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu			n/a	n/a	85,88 %	100	100	
Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan			n/a	n/a	100 %	100	100	
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Badan Kestuan Bangsa dan Politik yang difasilitasi			n/a	n/a	14 bulan	14	21	
Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD			n/a	n/a	12 laporan	12	12	
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun			n/a	n/a	1 dokumen	1	1	
Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun			n/a	n/a	17 laporan	17	17	
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			n/a	n/a	100 %	100	100	
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi			n/a	n/a	1 jenis	1	1	
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi			n/a	n/a	2 jenis	2	2	
Jumlah pemenuhan barang cetak			n/a	n/a	1877 lembar	1.877	n/a	
Jumlah pemenuhan barang penggandaan			n/a	n/a	37988 lembar	33.419	n/a	
Jumlah pemenuhan bahan bacaan			n/a	n/a	1 jenis	1	1	
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			n/a	n/a	89 kali	95	4	
Prosentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			n/a	n/a	100 %	100	100	
Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			n/a	n/a	5 unit	2	5	
Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			n/a	n/a	100 %	100	100	
Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			n/a	n/a	29 laporan	29	n/a	

Indikator Program /kegiatan dan sub kegiatan	SPM	IKK	Realisasi Renstra PD			Target Renstra PD		K e t
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah			n/a	n/a	100 %	100	100	
Jumlah penyediaan jasa surat menyurat			n/a	n/a	1 paket	1	1	
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			n/a	n/a	12 bulan	12	12	
Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik			n/a	n/a	100 %	100	100	
Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara			n/a	n/a	2 unit	2	2	
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya			n/a	n/a	47 unit	14	14	
Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			n/a	n/a	17 unit	17	1	
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Bakesbangpol yang dipelihara			n/a	n/a	25 unit	25	89	

2.3 Isu -isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu isu penting karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang adalah :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai wadah dan pelayanan dari lembaga organisasi politik, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya yang terhimpun dalam suatu lembaga yang menangannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat strategi dan kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Capaian kinerja pelayanan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang periode tahun 2018-2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. Yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2018-2013. Dari semua indikator yang ada, realisasi kinerja telah memenuhi target. Kinerja positif Bakesbangpol Kabupaten Jombang tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan realisasi kinerja keuangan.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Jombang, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Jombang berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi
- b. Masih rendahnya koordinasi politik dan munculnya sikap apatis terhadap pemerintah
- c. Masih rendahnya peranan perempuan dalam kehidupan berpolitik
- d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan perkembangan politik
- e. Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
- f. Kurang optimalnya koordinasi penanganan konflik sosial di lapangan

- g. Masih rendahnya sumberdaya manusia yang mampu melakukan cegah dini dan deteksi dini terhadap setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat
 - h. Masih rendahnya kerukunan hidup antar umat beragama.
 - i. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan .
 - j. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
 - k. Munculnya ajaran/ aliran yang dianggap menyimpang dari pokok - pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah - tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA
 - l. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah strategi dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang ada atau mengubahnya menjadi peluang sebagai berikut:
- a. Tantangan
- Adapun beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bakesbangpol dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut:
- 1. Globalisasi
 - 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur
 - 3. Jumlah personil tim monitoring Bakesbangpol masih kurang
 - 4. Masih lemahnya koordinasi antara instansi yang terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik untuk urusan Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - 5. Dinamika dari kelompok agama yang banyak tumbuh di Jombang
 - 6. Peningkatan tindak kriminalitas, khususnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang ada di Jombang

7. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam hal pendidikan politik serta wawasan kebangsaan
- b. Peluang
 1. Tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan aparat keamanan, instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
 2. Keterbukaan informasi dan berkembangnya Teknologi informasi;
 3. Partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dini konflik sosial.
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan untuk program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut di atas maka sangat diperlukan rencana pelayanan yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik antara lain:
 1. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat.
Terwujudnya suasana partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam iklim yang demokratis yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan kondusif menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.
 2. Meningkatkan sinergitas dalam penanganan konflik sosial dan peningkatan deteksi dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas
 3. Melakukan sosialisasi P4GN
 4. Berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat , FKUB, FPK dan Ormas keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi

2.4 Reviu terhadap rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja PD. Dalam rancangan RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan yang akan menghasilkan program prioritas

Berikut revidir terhadap rancangan awal RKPD pada Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Jombang

Tabel 2.3
Reviu terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase etnis/suku di kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100		Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase etnis/suku di kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100		
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diusulkan	100		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang diusulkan	100		
			Jumlah etnis/suku di kabupaten jombang yang dikuatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	17				Jumlah etnis/suku di kabupaten jombang yang dikuatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	17		
	Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	3	Rp 52.250.000	Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	3		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	440	Rp 944.156.000	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	440		
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	Rp 175.000.000	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4		
	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase partai politik yang melakukan kaderisasi	100		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase partai politik yang melakukan kaderisasi	100		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan		Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan	100		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan		Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					
			Persentase partai politik yang mendapatkan fasilitas bantuan pendidikan politik	17				Persentase partai politik yang mendapatkan fasilitas bantuan pendidikan politik	17		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3	Rp 17.362.500	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	3		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	440	Rp 834.675.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	440		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4	Rp 90.910.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4		
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	100		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	100		
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Persentase rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	100		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Persentase rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	100		
			Jumlah organisasi kemasyarakatan aktif yang dibina	50				Jumlah organisasi kemasyarakatan aktif yang dibina	50		
	Penyusunan Program kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4	Rp 45.549.800	Penyusunan Program kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	350	Rp 394.999.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	350		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	Rp 89.499.900	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4		
	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya		Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama	100		Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya		Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama	100		
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya		Prosentase rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang diusulkan	100		Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya		Prosentase rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang diusulkan	100		
			Persentase kegiatan kerukunan umat beragama yang terlaksana	100				Persentase kegiatan kerukunan umat beragama yang terlaksana	100		
			Jumlah ASN yang mendapatkan tes narkoba	100				Jumlah ASN yang mendapatkan tes narkoba	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	Rp 60.757.500	Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2		
	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	415	Rp 837.617.000	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	415		
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	Rp 125.500.000	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4		
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi		Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	3		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi		Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	3		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Penanganan Konflik Sosial					Penanganan Konflik Sosial					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Prosentase rumusan kebijakan bidang Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang diusulkan	100		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Prosentase rumusan kebijakan bidang Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang diusulkan	100		
			Jumlah laporan rekapitulasi hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Kabupaten Jombang	12				Jumlah laporan rekapitulasi hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Kabupaten Jombang	12		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2	Rp 227.275.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1408	Rp 842.614.700	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1408		
	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216	Rp 95.113.550	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	Rp 334.196.750	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur	100		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan	100		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan	100		
	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	3	Rp 24.999.850	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan PD	3		
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	Rp 20.499.900	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100		
			Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100				Prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	21	Rp 3.249.329.658	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	21		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12	Rp 250.259.120	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	12		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1	Rp 4.507.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran		Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17	Rp 5.668.750	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran		Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100		
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Rp 3.767.500	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor		Jumlah paket komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	4	Rp 29.931.925	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	4		
	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	Rp 60.870.000	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2		
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Rp 23.306.050	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2	Rp 6.642.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2		
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	Rp 131.170.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4		
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah		prosentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah		prosentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	Rp 59.680.200	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5	Rp 14.629.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5		
	Pengadaan Mebeler		Jumlah Paket Mabel yang disediakan	3	Rp -	Pengadaan Mebeler		Jumlah Paket Mabel yang disediakan	3		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	100		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Rp 38.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perinaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	14	Rp 53.980.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perinaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	14		
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diupelihara/rehabilitasi	2	Rp 27.063.600	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diupelihara/rehabilitasi	2		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Kesatuan dan Politik disusun dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat tentang kebijakan. Program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Usulan program dan kegiatan berasal dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan tinggi yang merupakan hasil dari musrenbang desa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang Kabupaten. Hasil musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024 yang nantinya digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya semua usulan program / kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil pencermatan usulan musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan kerja. Kemudian rancangan renja tersebut dibahas dalam forum OPD. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah penyelarasan program dan kegiatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten maka ditetapkan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang yang Tahun 2024 memuat 6 (enam) program dan 12 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Jombang sebesar Rp. 73,867,200,144,00.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Jombang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab 3

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2024 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum :

1. Kerukunan umat beragama di daerah;
2. Kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebhinekaan;
3. Peningkatan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM);
4. Kinerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah;
5. Penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila;
6. Pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini;
7. Kewaspadaan dini dan deteksi dini di daerah;
8. Pendidikan politik dan Penguatan Ideologi Pancasila bagi Pengurus Partai Politik;
9. Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah;
10. Peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesbangpol dalam pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
11. Pembinaan dan Pemberdayaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan;
12. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan ASN);
13. Peningkatan efektivitas Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di wilayah kerja masing-masing;
14. Dukungan sukses persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Jombang merumuskan beberapa program prioritas pada Tahun 2024 :

1. Penggalangan masyarakat melalui sosialisasi/dialog/elitasi terkait potensi munculnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) utamanya ancaman radikalisme/terorisme dan penggalangan di bidang keamanan;
2. Peningkatan kapasitas Forum Kewaspadaan Dini melalui pembekalan kepada anggota FKDM dengan sasaran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten/ Kecamatan serta pembinaan anggota FKDM Desa;
3. Pelaksanaan tes urin bekerja sama dengan BNNK untuk pegawai pemerintahan sesuai arahan bupati dalam rangka mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkup pemerintah daerah kabupaten jombang;
4. Sosialisasi atau penyuluhan Pendidikan politik bagi masyarakat , generasi muda atau pemilih pemula dan kegiatan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2024;
5. Pembinaan kepada organisasi masyarakat yang terdaftar di daerah;
6. Pelaksanaan Program Paskibraka dilaksanakan kepada Paskibraka, Purnapaskibraka, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta terhadap aktivitas kepaskibrakaan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang didasari atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugadan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan bangsa dan politik. Untuk sasaran Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Jombang dirumuskan dengan berdasarkan pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dengan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024, yaitu “Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul” dan

dijabarkan dalam sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan dan ketentraman umum;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk mewujudkan SDM yang unggul serta pengentasan kemiskinan ekstrem;
3. Memperkuat infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah.

Dan untuk mewujudkan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik aten Jombang Tahun 2024, yaitu :

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah

- ✓ Mewujudkan Ketahanan Ideologi, wawasan kebangsaan , kewaspadaan dini, politik, kemasyarakatan dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi
- ✓ Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah

- ❖ Peningkatan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan Dini, Politik, Kemasyarakatan dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi
- ❖ Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program Kerja adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas serta sebagai dasar untuk mempermudah upaya-upaya pembinaan dan pemberdayaan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan.

Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibanding dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan.

Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam program-program strategis OPD dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Program Kerja dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 6 program dan 12 kegiatan

b. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 6 (program) program, 12 (dua belas) kegiatan dan **42 (empat puluh dua)**, adapun rinciannya program/kegiatan/sub kegiatan , indikator dan pagu anggarannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan evaluasi Perangkat daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Input : Rp. 24.240.950,00

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan PD

Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

b. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input : Rp. 20.499.800,00

Output : Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Outcome Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input : Rp. 3.330.562.899,00

Output : Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN

Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

Input : Rp. 283.359.048,00

Output : Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan

Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD

Input : Rp. 4.403.750,00

Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

- d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran

Input : Rp. 4.177.750,00

Output : Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Input : Rp. 11.400.000,00

Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan

Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

7. Administrasi Umum PD

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Input : Rp. 3.505.300,00

- Output* : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- Outcome* : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Input* : Rp. 34.687.800,00
- Output* : Jumlah paket peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan
- Outcome* : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah
- c. Penyediaan bahan logistik kantor
- Input* : Rp. 67.133.550,00
- Output* : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
- Outcome* : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah
- d. Penyediaan Barang cetakan dan pengandaan
- Input* : Rp. 23.306.050,00
- Output* : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
- Outcome* : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Input* : Rp. 9.300.000,00
- Output* : Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
- Outcome* : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah
- g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Input* : Rp. 241.420.000,00
- Output* : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Outcome* : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah
- 8. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah**
- a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Input : Rp. 74.017.909,00
Output : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Outcome Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik

Input : Rp. 47.400.000,00
Output : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan
Outcome Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Input : Rp. 39.810.000,00
Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

Input : Rp. 29.460.000,00
Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

- b. Pemeliharaan /rehabiltasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

Input : Rp. 14.977.500,00
Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabiltasi
Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

- c. Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Input : Rp. 23.006.000,00

Output : Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Outcome : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah

II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

- a Penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan

Input : Rp. 53.806.000,00

Output : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Outcome : Jumlah konflik ideologi

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan

Input : Rp. 205.160.100,00

Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan dan sejarah kebangsaan

Outcome : Jumlah konflik ideologi

- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Input : Rp. 122.495.000,00

Output : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Outcome : Jumlah konflik ideologi

- d. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

Input : Rp. 653.177.950,00

Output : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka

Outcome : Jumlah konflik ideologi

III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Input : Rp. 17.455.000,00

Output : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

Outcome : Jumlah konflik Politik dan organisasi kemasyarakatan

- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Input : Rp. 59.420.310.590,00

Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Outcome : Jumlah konflik Politik dan organisasi kemasyarakatan

- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Input : Rp. 87.340.000,00

Output : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Outcome : Jumlah konflik Politik dan organisasi
kemasyarakatan

**IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan**

***Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan
pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan***

- a. Penyusunan Program kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Input : Rp 6.303.000,00

Output : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun

Outcome : Jumlah konflik Politik dan organisasi
kemasyarakatan

- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Input : Rp. 7.615.716.100,00

Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Outcome : Jumlah konflik Politik dan organisasi
kemasyarakatan

- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Input : Rp. 135.430.000,00

Output : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Outcome : Jumlah konflik Politik dan organisasi kemasyarakatan

V. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Input : Rp. 1.417.500

Output : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun

Outcome : Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Input : Rp. 1.417.500

Output : Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah yang Disusun

Outcome : Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Input : Rp.337.277.000

Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Outcome : Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Input : Rp. 112.867.500

Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat

Outcome : Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah

Input : Rp. 1.217.000

Output : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan

Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Outcome : Jumlah konflik ekonomi dan sosial budaya

VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Input : Rp. 2.577.050

Output : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Outcome : Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG

- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas iKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Input : Rp. 109.898.500

Output : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Outcome : Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG

- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Daerah

Input : Rp. 462.534.800

Output : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Outcome : Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG

- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen, Pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah

Input : Rp.63.544.200

Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Outcome* : Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG
- e Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan, tenaga kerja asing dan lembaga asing , kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- Input* : Rp. 23.274.750
- Output* : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Outcome* : Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG
- f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
- Input* : Rp.291.446.550
- Output* : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
- Outcome* : Jumlah rekomendasi kebijakan pimpinan daerah terkait ATHG

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
2	3	4		8	9			15	16
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				73.867.200.110,00				14.815.337.950,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				73.867.200.110,00				14.815.337.950,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				73.867.200.110,00				14.815.337.950,00
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur</i>	Kabupaten Jombang	100 Pesen	4.286.668.306,00	APBD		100 Pesen	4.314.656.626,00
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penaganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan. Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan</i>	Kabupaten Jombang	100 Persen	44.740.750,00	APBD		100 Persen	47.094.338,00
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kabupaten Jombang	3 Dokumen	24.240.950,00	APBD		3 Dokumen	25.569.443,00
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kabupaten Jombang	12 Laporan	20.499.800,00	APBD		12 Laporan	21.524.856,00
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu</i>	Kabupaten Jombang	100 Persen 100 Persen	3.622.503.447,00	APBD		100 Persen 100 Persen	3.687.798.743,00
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kabupaten Jombang	21 Orang/bulan	3.330.562.899,00	APBD		21 Orang/bulan	3.411.796.141,00
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Kabupaten Jombang	12 Dokumen	263.369.048,00	APBD		12 Dokumen	265.292.076,00
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kabupaten Jombang	1 Laporan	4.403.750,00	APBD		1 Laporan	4.733.348,00
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Kabupaten Jombang	17 Laporan	4.177.750,00	APBD		17 Laporan	5.977.178,00
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
		<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Bakesbangpol</i>	Kabupaten Jombang	100 Pesen	11.400.000,00	APBD		100 Pesen	12.000.000,00
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Kabupaten Jombang	2 Paket	11.400.000,00	APBD		2 Paket	12.000.000,00
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	Kabupaten Jombang	100 Pesen	379.362.700,00	APBD		100 Pesen	345.655.354,00
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kabupaten Jombang	1 Paket	3.505.300,00	APBD		1 Paket	3.955.875,00
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kabupaten Jombang	4 Paket	34.687.800,00	APBD		4 Paket	38.190.376,00
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kabupaten Jombang	2 Paket	67.133.560,00	APBD		2 Paket	64.837.500,00
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kabupaten Jombang	3 Paket	23.306.060,00	APBD		3 Paket	24.471.353,00
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kabupaten Jombang	2 Dokumen	9.300.000,00	APBD		2 Dokumen	12.285.000,00
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kabupaten Jombang	4 Laporan	241.420.000,00	APBD		4 Laporan	203.915.250,00
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
		<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	Kabupaten Jombang	100 Pesen	74.017.909,00	APBD		100 Pesen	33.272.111,00
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kabupaten Jombang	23 Unit	74.017.909,00	APBD		23 Unit	33.272.111,00
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	Kabupaten Jombang	100 Pesen	47.400.000,00	APBD		100 Pesen	49.770.000,00
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kabupaten Jombang	12 Laporan	47.400.000,00	APBD		12 Laporan	49.770.000,00
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		<i>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</i>	Kabupaten Jombang	100 Pesen	107.253.500,00	APBD		100 Pesen	139.066.080,00
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kabupaten Jombang	1 Unit	39.810.000,00	APBD		1 Unit	39.810.000,00
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kabupaten Jombang	13 Unit	29.460.000,00	APBD		13 Unit	30.933.000,00
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kabupaten Jombang	2 Unit	14.977.500,00	APBD		2 Unit	28.416.780,00
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kabupaten Jombang	89 Unit	23.006.000,00	APBD		89 Unit	39.906.300,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase etnis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Prosentase kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila	Kabupaten Jombang	100 Persen 100 Pesen	1.034.639.050,00	APBD		100 Persen 100 Pesen	1.540.690.850,00
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah etnis/suku di Kabupaten Jombang yang dikuatkan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Jumlah pemuda kader Kabupaten/Kota yang lolos seleksi sebagai Paskebraka Prosentase rumusan kebijakan bidang penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diusulkan</i>	Kabupaten Jombang	17 suku/etnis 74 Orang 100 Persen	1.034.639.050,00	APBD		17 suku/etnis 74 Orang 100 Persen	1.540.690.850,00
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>	Kabupaten Jombang	6 Dokumen	53.806.000,00	APBD		6 Dokumen	60.000.000,00
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	Kabupaten Jombang	550 Orang	206.160.100,00	APBD		550 Orang	500.000.000,00
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	Kabupaten Jombang	4 Laporan	122.495.000,00	APBD		4 Laporan	180.000.000,00
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepeksibrakaan dan Purnapaskibraka								
		<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepeskitbrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>	Kabupaten Jombang	1 Dokumen	653.177.960,00	APBD		1 Dokumen	800.690.850,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partai politik yang melakukan kaderisasi	Kabupaten Jombang	100 Pesen	59.525.105.590,00	APBD		100 Pesen	5.907.875.000,00
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Prosentase partai politik yang mendapatkan fasilitas bantuan pendidikan politik Prosentase rumusan kebijakan bidang peningkatan peran Partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan perkembangan etika serta budaya politik yang diusulkan</i>	Kabupaten Jombang	100 Pesen 100 Pesen	59.525.105.590,00	APBD		100 Pesen 100 Pesen	5.907.875.000,00
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	Kabupaten Jombang	6 Dokumen	17.455.000,00	APBD		6 Dokumen	25.000.000,00
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Kabupaten Jombang	350 Orang	58.420.310.590,00	APBD		350 Orang	5.789.035.000,00
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	Kabupaten Jombang	4 Laporan	87.340.000,00	APBD		4 Laporan	53.840.000,00
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	Kabupaten Jombang	5 Pesen	7.757.449.100,00	APBD		5 Pesen	531.935.118,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan aktif yang dibina Persentase rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	Kabupaten Jombang	50 ormas 100 Pesen	7.757.449.100,00	APBD		50 ormas 100 Pesen	531.995.118,00
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kabupaten Jombang	4 Dokumen	6.303.000,00	APBD		4 Dokumen	25.000.000,00
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Jombang	750 Orang	7.615.716.100,00	APBD		750 Orang	413.469.948,00
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kabupaten Jombang	4 Laporan	135.430.000,00	APBD		4 Laporan	93.445.170,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan	Kabupaten Jombang	100 Persen	337.062.450,00	APBD		100 Persen	1.001.408.008,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah ASN yang mendapatkan test Narkoba Persentase kegiatan kerukunan umat beragama yang terlaksana Prosentase rumusan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang diusulkan</i>	Kabupaten Jombang	100 Orang 100 Pesen 100 Persen	337.062.450,00	APBD		100 Orang 100 Pesen 100 Persen	1.001.408.008,00
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>	Kabupaten Jombang	8 Dokumen	56.997.400,00	APBD		8 Dokumen	59.847.375,00
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	Kabupaten Jombang	3250 Orang	177.940.060,00	APBD		3250 Orang	834.314.420,00
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	Kabupaten Jombang	4 Laporan	102.125.000,00	APBD		4 Laporan	107.246.213,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial	Kabupaten Jombang	3 Laporan	926.275.618,00	APBD		3 Laporan	1.518.772.344,00
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rekapitulasi hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Kabupaten Jombang Persentase rumusan kebijakan bidang pemantapan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial yang diusulkan	Kabupaten Jombang	12 Laporan 100 Pesen	926.275.618,00	APBD		12 Laporan 100 Pesen	1.518.772.344,00
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kabupaten Jombang	2 Dokumen	145.996.250,00	APBD		2 Dokumen	166.366.750,00
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kabupaten Jombang	1200 Orang	313.790.368,00	APBD		1200 Orang	878.659.688,00
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
		<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	Kabupaten Jombang	216 Laporan	158.740.000,00	APBD		216 Laporan	122.597.318,00
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kabupaten Jombang	12 Dokumen	307.750.000,00	APBD		12 Dokumen	361.116.588,00
J U M L A H					73.867.200.110,00				14.815.337.950,00

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH****Bab
4****4.1 Rencana Kerja dan kerangka Pendanaan**

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk dunia usaha yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mulai membuat rencana aksi agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang direncanakan dengan realisasi anggaran yang ada. Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat

luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang didasarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi ancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah terinci dan terencana dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dimana nama program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya telah disesuaikan dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 serta Kepmendagri 050-5889/2021. Jumlah program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang pada tahun 2024 sejumlah 6 program, 12 kegiatan dan **42 sub kegiatan**. Sub kegiatan-sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang. Sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum(DAU).

Adapun program, kegiatan, sub kegiatan indikator, kelompok sasaran, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dijelaskan secara terperinci sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	8	9
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			73.867.200.110,00
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			73.867.200.110,00
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			73.867.200.110,00
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Prosentase rata rata capaian kinerja aparatur</i>	100 Pesen	4.286.668.306,00
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun secara aturan</i>	100 Persen 100 undefined	44.740.750,00
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	24.240.950,00
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	12 Laporan	20.499.800,00
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang lewat waktu</i>	100 Persen 100 Persen	3.622.503.447,00
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	21 Orang/bulan	3.330.562.899,00
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	283.359.048,00
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	4.403.750,00
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>	17 Laporan	4.177.750,00
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Bakesbangpol</i>	100 Pesen	11.400.000,00
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
			<i>Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	11.400.000,00
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100 Persen	379.352.700,00
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 Paket	3.505.300,00
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	34.687.800,00
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	67.133.550,00
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	23.306.050,00
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	2 Dokumen	9.300.000,00
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan	241.420.000,00
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	100 Persen	74.017.909,00
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	23 Unit	74.017.909,00
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 Pesen	47.400.000,00
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	47.400.000,00
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik</i>	100 Pesen	107.253.500,00
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	39.810.000,00
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	13 Unit	29.460.000,00
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	14.977.500,00
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	89 Unit	23.006.000,00
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Prosentase etnis/suku di Kabupaten Jombang yang mendapatkan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Prosentase kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter pancasila</i>	100 Persen 100 Pesen	1.034.639.050,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah etnis/suku di Kabupaten Jombang yang dikuatkan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Jumlah pemuda kader Kabupaten/Kota yang lolos seleksi sebagai Paskibraka Prosentase rumusan kebijakan bidang penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang disusun</i>	17 suku/etnis 74 Orang 100 Persen	1.034.639.050,00
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>	6 Dokumen	53.806.000,00
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	550 Orang	205.160.100,00
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	4 Laporan	122.495.000,00
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>	1 Dokumen	653.177.950,00
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Prosentase partai politik yang melakukan kaderisasi</i>	100 Pesen	59.525.105.590,00
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Prosentase partai politik yang mendapatkan fasilitas bantuan pendidikan politik Prosentase rumusan kebijakan bidang peningkatan peran Partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan perkembangan etika serta budaya politik yang disusun</i>	100 Persen 100 Pesen	59.525.105.590,00
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>	6 Dokumen	17.455.000,00
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	350 Orang	59.420.310.590,00
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Ketelenggaraan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	87.340.000,00
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase peningkatan Ormas/LSM yang berperan aktif	5 Pesen	7.757.449.100,00
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan aktif yang dibina Persentase rumusan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	50 ormas 100 Pesen	7.757.449.100,00
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	6.303.000,00
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750 Orang	7.615.716.100,00
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	135.430.000,00
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan	100 Persen	337.062.450,00
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah ASN yang mendapatkan test Narkoba Persentase kegiatan kerukunan umat beragama yang terlaksana Prosentase rumusan kebijakan bidang pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang diusulkan	100 Orang 100 Pesen 100 Persen	337.062.450,00
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	8 Dokumen	56.997.400,00
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3250 Orang	177.940.050,00
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
				TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	4 Laporan	102.125.000,00
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Jumlah laporan deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik sosial</i>	3 Laporan	926.275.618,00
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah laporan rekapitulasi hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi kamtibmas di Kabupaten Jombang Persentase rumusan kebijakan bidang pemantapan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial yang diusulkan</i>	12 Laporan 100 Pesen	926.275.618,00
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>	2 Dokumen	145.995.250,00
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	1200 Orang	313.790.368,00
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	216 Laporan	158.740.000,00
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	12 Dokumen	307.750.000,00
J U M L A H					73.867.200.110,00

PENUTUP**Bab
5****5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sebagai dokumen teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026. selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran –sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana strategis (RENSTRA) 2018-2023 tersebut, di dalam pelaksanaanya harus menetapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari

tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan

3. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham
4. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 , harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan berikutnya

5.3 Rencana Tindak lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti , diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan.kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalm proses perencanaan maupun perumusan kebijakan sehingga aspirasi dan kepentingan terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik

Berdasarkan hal tersebut diatas , partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan public, membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya , maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan
2. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan peningkatan pemahaman dalam pencegahan konflik IPOLEKSOSBUD yang terjadi.
3. Mengusulkan peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks melalui pendidikan

formal, bimtek, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan

4. Aparatur perencanaan yang saat ini dari sisi kualitas masih kurang, hal tersebut berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang , sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang
5. Menerapkan reward dan punishment terhadap seluruh karyawan
6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah ditetapkan.

Pada tanggal, 11 Juli 2023

KEPALA BAKESBANGPOL



Drs. ANWAR, M.KP
Pembina Tk.I

NIP. 197104181992011004